

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan. Karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang terbesar dalam APBN. Hal ini dapat kita lihat dalam APBN tahun 2011, sektor pajak memberikan kontribusi terbesar pada sumber penerimaan negara yaitu sebesar Rp 839,5 trilyun atau sekitar 77 persen dari total pendapatan negara. Jumlah itu naik menjadi Rp 980.1 trilyun, pada APBN tahun 2012, atau naik 16.8 persen dari tahun 2011. Dan pada tahun 2013 target penerimaan pajak semakin meningkat hingga 1.041 trilyun atau meningkat sekitar 6.2 persen dari tahun 2012. Meningkatnya target pajak tersebut tidak lain disebabkan karena meningkatnya pengeluaran Pemerintah dan rencana Pemerintah untuk melunasi hutang luar negeri.

Meningkatnya target penerimaan yang dibebankan kepada Direktorat Jenderal Pajak (selanjutnya disingkat DJP) sebagai institusi yang bertugas untuk mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak, membuat tiap Kantor Pelayanan Pajak (selanjutnya disingkat KPP) yang merupakan unit vertical pelaksana dari DJP di seluruh Indonesia mengalami kenaikan target penerimaan. Hal itu membuat para pegawai DJP harus semakin meningkatkan upayanya dalam kegiatan pengumpulan pajak dan penggalian potensi pajak yang ada di wilayah kerjanya, baik secara intensifikasi perpajakan maupun ekstensifikasi perpajakan.

Salah satu target penerimaan yang dibebankan kepada Kantor Pelayanan Pajak adalah Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri selanjutnya disingkat PPN KMS, dimana target ini secara khusus dibebankan kepada Seksi Ekstensifikasi.

Potensi perpajakan di sektor ini masih banyak yang belum tergali, hal ini disebabkan Wajib Pajak masih berupaya untuk menghindari beban pajak yang dikenakan kepadanya atau semaksimal mungkin mengurangi beban pajaknya. Di sisi lain, pemerintah sangat membutuhkan dana hasil pungutan pajak tersebut untuk menjamin guna membiayai belanja-belanja negara.

Upaya dalam memaksimalkan Penerimaan PPN KMS dilakukan dengan melakukan himbauan penyetoran PPN KMS kepada Wajib Pajak yang secara nyata melakukan kegiatan yang terutang PPN KMS. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, usaha ini mengalami kendala baik dari sisi sumber daya manusia dibandingkan dengan luas wilayah kerja maupun keterbatasan informasi tentang adanya Kegiatan Membangun Sendiri yang terutang PPN yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Pemilihan KPP Pratama Medan Petisah sebagai tempat penelitian dilatarbelakangi oleh banyaknya kegiatan membangun sendiri yang dilakukan oleh Wajib Pajak di wilayah kerja KPP Pratama Medan Petisah dan jumlah PPN KMS yang disetor ke kas negara masih belum sesuai dengan jumlah yang diharapkan.

Atas dasar sebagaimana dijelaskan di atas penulis tertarik untuk memilih judul skripsi sebagai persyaratan guna menyelesaikan pendidikan Strata-I (S1)